



## **LAPORAN SINGKAT**

### **KOMISI VIII DPR RI**

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).**

---

Rapat Ke : 7  
Tahun Sidang : 2018-2019  
Masa Persidangan : I  
Jenis Rapat/ke- : Rapat Kerja / Ke- 4  
Dengan : Menteri Sosial RI  
Sifat Rapat : TERBUKA  
Hari, Tanggal : Kamis, 6 September 2018  
Waktu : Pukul 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI  
Ketua Rapat : **Dr. H. M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.**  
Sekretaris Rapat : Sigit Bawano Prasetyo, S.Sos., M.Si.  
Acara : Membahas RKA K/L Tahun 2019  
Hadir : 1. .... orang dari 50 orang Anggota  
2. Menteri Sosial RI beserta jajarannya

#### **I. PENDAHULUAN:**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum, sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial RI dengan agenda “**Pembahasan RKA-KL Kementerian Sosial RI Tahun 2019**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami pagu anggaran Kementerian Sosial RI dalam RAPBN Tahun 2019 sebesar **Rp58.906.458.379.000-** (*lima puluh delapan triliun sembilan ratus enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*), yang akan dialokasikan untuk program:

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU ANGGARAN 2019</b>
1	Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	Rp372.227.070.000,-
2	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Rp47.302.812.000,-
3	Pemberdayaan Sosial	Rp429.362.610.000,-
4	Rehabilitasi Sosial	Rp1.163.312.583.000,-
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp34.765.659.285.000,-
6	Penanganan Fakir Miskin	Rp21.405.310.213.000,-
7	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	Rp723.283.806.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp58.906.458.379.000,-</b>

2. Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut bersama pejabat eselon I terhadap pagu anggaran dan usulan tambahan anggaran Kementerian Sosial RI dalam RAPBN tahun 2019 sebesar **Rp988.980.150.000,-** (*sembilan ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah*). Oleh karena itu, rincian pengalokasian pagu anggaran dan usulan tambahan untuk penanganan korban bencana NTB dan anggaran lainnya, hendaknya diserahkan kepada Komisi VIII DPR RI sebelum rapat pendalaman.

3. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Sosial RI agar dalam penyusunan program dan pengalokasian anggaran untuk RKA-K/L Kementerian Sosial RI Tahun 2019 secara sungguh-sungguh menindaklanjuti pandangan, pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial.
  - b. Meningkatkan pengalokasian anggaran bantuan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), terutama yang dikelola masyarakat, dengan melakukan bimbingan dan pelayanan bagi anak-anak.
  - c. Memperkuat kebijakan sumber daya manusia melalui pembinaan, bimbingan teknis dan kesejahteraan bagi pendamping program kesejahteraan sosial, agar terjadinya peningkatan kinerja.
  - d. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program kesiapsiagaan dan mitigasi bencana serta penanganan darurat korban bencana.
  - e. Menyusun peta daerah yang memiliki Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dijadikan sebagai basis data dalam mengambil kebijakan.
  - f. Melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial secara berkala sehingga terwujudnya data kemiskinan yang terintegrasi dengan Basis Data Terpadu (BDT).
  - g. Mengoptimalkan peran pekerja sosial dalam memberikan pelayanan psikososial bagi korban bencana NTB.
  - h. Meningkatkan sosialisasi tentang capaian kinerja yang telah diraih oleh Kementerian Sosial RI.
  - i. Meningkatkan program penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.
  - j. Meningkatkan program sosialisasi dan penyuluhan program kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi masyarakat.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 14.50 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**

**ttd**

**Dr. H.M. ALI TAHER, S.H. M.Hum.**